

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Evaluasi Program Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Mengurangi Angka Kekerasan pada Anak di Kabupaten Mojokerto, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Mojokerto telah terlaksana melalui berbagai program pada masing-masing klaster, namun pelaksanaannya masih belum sepenuhnya optimal dalam mencapai tujuan perlindungan anak secara menyeluruh. Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn (2018), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Pada indikator efektivitas, pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mojokerto menunjukkan bahwa berbagai program dan layanan terkait pemenuhan hak anak telah dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal tersebut dapat dilihat melalui pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak, pelayanan administrasi kependudukan anak, layanan kesehatan anak, serta perlindungan khusus anak. Selain itu, capaian kepemilikan Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Namun demikian, pelaksanaan program masih belum sepenuhnya efektif karena angka kekerasan terhadap anak masih mengalami fluktuasi dan belum mengalami penurunan secara konsisten. Selain itu, masih terdapat beberapa kasus kekerasan yang baru diketahui ketika

kondisi korban sudah cukup serius, sehingga menunjukkan bahwa deteksi dini di lingkungan masyarakat masih belum optimal.

2. Pada indikator efisiensi, pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mojokerto masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut terlihat dari belum adanya pengelolaan anggaran yang terintegrasi secara khusus untuk pelaksanaan KLA sehingga program masih dijalankan melalui kegiatan pada masing-masing OPD. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dalam pelaksanaan layanan dan penanganan kasus anak juga menjadi salah satu hambatan, di mana petugas pendamping atau perlindungan anak masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah kasus dan luas wilayah Kabupaten Mojokerto sehingga pelayanan belum sepenuhnya cepat dan merata. Meskipun koordinasi Gugus Tugas KLA telah dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, namun hal tersebut masih belum cukup cepat untuk mendeteksi hambatan secara langsung di lapangan.
3. Pada indikator kecukupan, berbagai program yang dilaksanakan pada masing-masing klaster pada dasarnya telah menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Akan tetapi, pelaksanaan program tersebut masih belum cukup dalam menyelesaikan permasalahan anak secara menyeluruh. Hal ini terlihat dari masih adanya kasus kekerasan terhadap anak serta belum optimalnya layanan perlindungan dan pendampingan pada beberapa wilayah. Selain itu, keterbatasan akses layanan psikologis juga masih menjadi kendala karena layanan tersebut belum tersedia secara merata hingga tingkat kecamatan dan desa.

4. Pada indikator pemerataan, pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mojokerto masih menunjukkan adanya ketimpangan akses layanan dan pelaksanaan program antar wilayah. Beberapa program seperti pelayanan administrasi kependudukan dan Sekolah Ramah Anak telah menjangkau sebagian besar wilayah, namun layanan perlindungan anak dan layanan psikologis masih lebih terpusat di tingkat kabupaten sehingga masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan masih mengalami keterbatasan akses.
5. Pada indikator responsivitas, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menunjukkan adanya upaya dalam merespon kebutuhan masyarakat melalui berbagai inovasi layanan seperti pelayanan jemput bola, layanan administrasi berbasis digital, serta keberadaan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak. Akan tetapi, pelaksanaan sosialisasi Forum Anak masih belum menjangkau seluruh anak secara merata sehingga masih terdapat anak yang belum memahami hak anak, perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan kekerasan. Selain itu, berdasarkan informasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Mojokerto, masih ditemukan kasus kekerasan terhadap anak yang baru dilaporkan ketika kondisi korban sudah cukup serius sehingga penanganan menjadi terlambat.
6. Pada indikator ketepatan, pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mojokerto pada dasarnya telah sesuai dengan kebijakan nasional terkait perlindungan anak serta indikator Kabupaten Layak Anak. Program-program yang dilaksanakan juga telah mengarah pada pemenuhan hak anak

dalam bidang pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, dan perlindungan khusus anak. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara tujuan program dengan hasil yang dicapai sehingga dampak program terhadap penurunan angka kekerasan anak belum sepenuhnya optimal.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Mojokerto telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai OPD dan program pada masing-masing klaster. Akan tetapi, masih diperlukan peningkatan koordinasi Gugus Tugas KLA, pemerataan layanan hingga tingkat kecamatan dan desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi anggaran dan layanan pendukung, perluasan sosialisasi Forum Anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaporan kasus kekerasan anak agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara lebih maksimal dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui Gugus Tugas KLA diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas klaster serta meningkatkan integrasi pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak. Saran ini diberikan karena berdasarkan kondisi di lapangan pelaksanaan program masih berjalan secara sektoral pada masing-masing OPD sehingga integrasi antar program belum optimal dalam penanganan kasus anak. Selain itu, pengelolaan anggaran KLA belum terintegrasi secara khusus sehingga setiap OPD masih menjalankan kegiatan

berdasarkan anggaran masing-masing, yang berdampak pada terbatasnya pelaksanaan kegiatan lintas sektor seperti sosialisasi dan layanan pendukung yang belum menjangkau seluruh wilayah secara merata. Oleh karena itu, diperlukan integrasi perencanaan dan penganggaran KLA agar pelaksanaan program lebih terpadu dan merata.

Selain itu, monitoring dan evaluasi yang dilakukan setiap tiga bulan sekali masih belum cukup responsif dalam mendeteksi hambatan di lapangan, mengingat permasalahan anak dapat terjadi sewaktu-waktu dan membutuhkan penanganan segera, sehingga diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih cepat dan berkelanjutan agar permasalahan dapat segera ditangani.

2. OPD yang terlibat dalam pelaksanaan KLA di Kabupaten Mojokerto diharapkan dapat meningkatkan pemerataan layanan perlindungan anak, termasuk layanan psikologis dan pendampingan korban kekerasan hingga tingkat kecamatan dan desa. Saran ini diberikan karena layanan masih terpusat di tingkat kabupaten sehingga masyarakat di wilayah jauh dari pusat pelayanan masih mengalami keterbatasan akses. Selain itu, terdapat keterbatasan SDM dalam Gugus Tugas KLA, di mana jumlah petugas pendamping perlindungan anak belum sebanding dengan jumlah kasus dan luas wilayah Kabupaten Mojokerto, sehingga penanganan belum dapat dilakukan secara cepat dan merata. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan penambahan SDM agar pelayanan lebih responsif dan menjangkau seluruh wilayah.
3. Forum Anak diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak, perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan kekerasan anak

secara lebih merata hingga ke seluruh sekolah dan wilayah. Saran ini diberikan karena berdasarkan kondisi di lapangan, kegiatan Forum Anak masih lebih banyak dirasakan oleh anak yang aktif dalam organisasi atau sekolah tertentu sehingga belum menjangkau seluruh anak secara merata.

4. Masyarakat diharapkan dapat lebih meningkatkan kepedulian dan partisipasi dalam mendukung pelaksanaan Program Kabupaten Layak Anak, khususnya dengan cara lebih peka terhadap kondisi anak di lingkungan sekitar, tidak mengabaikan tanda-tanda kekerasan, serta segera melaporkan apabila mengetahui, melihat, atau mencurigai adanya tindak kekerasan terhadap anak kepada pihak berwenang seperti UPTD PPA atau aparat desa setempat. Hal ini diperlukan karena berdasarkan informasi dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Mojokerto, masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang baru dilaporkan oleh masyarakat ketika kondisi korban sudah cukup serius, sehingga penanganan tidak dapat dilakukan sejak awal secara cepat dan optimal.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai Kabupaten Layak Anak dengan menggunakan pendekatan atau metode penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat lebih memfokuskan kajian pada masing-masing klaster atau menganalisis dampak program terhadap penurunan angka kekerasan anak secara lebih spesifik.